

## ABSTRAK

Kebutuhan akan transportasi untuk mobilitas dan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan hidup manusia makin hari kian meningkat. Sedangkan daya beli masyarakat Indonesia untuk membeli secara tunai cukup rendah sehingga kredit menjadi solusi terbaik untuk dapat membeli kendaraan pribadi. Jaminan Fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak baik berwujud, tidak berwujud, maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek dan menjadi jaminan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Proses yang cepat, mudah dan uang muka ringan menjadi faktor pendukung masyarakat Indonesia membeli kendaraan bermotor dengan metode pembayaran kredit. Namun cukup banyak dari debitur yang mengalami wanprestasi sehingga mengharuskan *leasing* menarik kendaraan milik debitur. Eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak *leasing* dengan menggunakan jasa *debt collector* kerap kali tidak sesuai aturan dan menimbulkan kerugian bagi debitur. Sehingga debitur perlu mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan dari penarikan paksa oleh *debt collector*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan jasa *debt collector* dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh *debt collector*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa penggunaan jasa *debt collector* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, namun dalam aturan tersebut tidak diatur secara rinci mengenai batasan-batasan tindakan *debt collector* dalam proses eksekusi. Hal ini perlu adanya pembaharuan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan debitur mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang *debt collector*.

**Kata Kunci** : Eksekusi Jaminan Fidusia, *Leasing*, *Debt Collector*,  
Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

*The need for transportation for mobility and for supporting the needs of human life is increasing day by day. Meanwhile, the purchasing power of the Indonesian people to buy in cash is quite low, so taking credit is the best solution to be able to purchase a private vehicle. Fiduciary Security is the right concerning moving objects both tangible, intangible, and immovable objects which cannot be encumbered with a mortgage and become the most favored security by the people of Indonesia. The fast, easy process and low down payment are supporting factors for the Indonesian people to purchase motor vehicles using the credit payment method. However, quite a lot of debtors are in default, requiring the leasing company to withdraw the debtor's vehicle. The execution of the object of fiduciary security carried out by the leasing company using the services of a debt collector often does not comply with the rules and causes losses to the debtor. So that debtors require legal protection to protect them from forced withdrawals by debt collectors. This study aims to determine the legal use of debt collector agencies and their form of legal protection against debtors for the forced withdrawal of fiduciary objects by debt collectors. The method used in this research is normative legal research based on a statutory approach and examines the literature related to these problems. The legal source of the use of debt collector services in Indonesia is Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 concerning Financing Company Business Operations. However, the regulation does not regulate in detail the limitations of debt collectors' actions in the execution process. This issue requires regulatory reforms to ensure legal certainty for the debtors to get legal protection from the arbitrary actions of debt collectors.*

**Keywords:** *Execution of Fiduciary Guarantee, Leasing, Debt Collector, Legal Protectio*